



Dugaan Korupsi Peternak Babi

Sudah Nyicil Tetap Ditahan

BERBICARA korupsi memang tidak ada habisnya. Setiap daerah berlomba mengirim perkara korupsi ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Seiring maraknya kasus korupsi, penanganan kasus ini masih dinilai menyisakan ironi karena dinilai diskriminatif. Pejabat penting melakukan korupsi tidak dipenjara, hanya menjalani tahanan kota termasuk ketika sudah divonis sekalipun. Bahkan, banyak yang di-SP3-kan (Surat Penghentian Penyidikan Perkara). Sementara rakyat kecil yang diduga melakukan tindak korupsi, langsung dijebloskan ke sel.

Salah satu contohnya adalah mereka yang terlibat kasus dugaan korupsi di Art Center Denpasar yakni mantan Kadisbud Ketut Suastika dan mantan Kepala UPT Taman Budaya Ketut Mantara Gandhi. Juga kasus dugaan korupsi BBM Jembrana dengan terdakwa mantan Kadisperindag Jembrana Dra. Ni Made Ayu Ardini, M.Si. Satu alasan yang dikemukakan, bahwa hakim mempunyai kewenangan dan barang tentu sudah dengan pertimbangan berlaku adil.

Di lain pihak, ada perkara yang kini dihadapi peternak babi Ni Gusti Ayu Nyoman Suciati asal Petang, Badung. Dia "meminjam" uang bantuan SPP PNPM-MPd. (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Petang karena babi yang

dipeliharanya mati. Sesuai kesepakatan saat rapat, dia diharuskan membayar uang tersebut dengan cara mencicil. Dia pun menyanggupinya dan benar-benar taat membayar cicilan tersebut hingga jumlah uang yang diduga dikorupsinya masih tersisa Rp 40 jutaan. "Saya siap membayar, dan rutin dibayar sampai sekarang sesuai kesepakatan," katanya.

Namun sayang, walau sudah membayar sesuai kesepakatan, dia malah dibidik polisi hingga kasus ini maju ke persidangan. Dan, terdakwa pun ditahan. Saat sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar, saking lugunya, pedang *canang* (sarana upacara bagi umat Hindu - red) ini melepas sandal yang dipakainya saat memasuki ruang sidang. Terdakwa mengaku bahwa babinya mati karena virus.

Saat ditemui di luar persidangan sebelum dijebloskan ke dalam sel, Suciati mengaku sama sekali tidak ada niat untuk melakukan korupsi. Dia mengaku akan bertanggung jawab atas segala pemakaian uang bantuan pemerintah itu. "Makanya suami *tiang* (saya) tidak pernah menyaksikan sidang. Suami *tiang* bekerja untuk mengembalikan dengan cara mencicil. Ini sudah ada kesepakatan dengan anggota dalam pertemuan di kantor," kata wanita asal Dusun Tiyingan, Desa Plaga, Petang,



Sambungan



Bali Post/asa

Suciati bersama kuasa hukumnya, Edy Hartaka.

Badung itu sambil menangis.

Dia kembali menceritakan, awalnya kelompok PNPM-MPd untuk SPP Biting Sari dan Lembu Nadi dapat bantuan total Rp 120 juta, yakni Rp 50 juta dan Rp 70 juta. "Yang Rp 50 juta sudah saya cicil 5 kali bayaran. Sedangkan yang Rp 70 juta saya cicil tiga kali," katanya sambil menyebutkan, saat itu sisanya Rp 76 juta.

Saat itu ada rapat dan terdakwa diminta membayar dengan cara mencicil. Terdakwa menyanggupi, karena hanya dibebankan membayar Rp 200 ribu per bulan. Sejak saat itu, dia lebih giat berjualan *canang* sehingga dia terus bisa membayar cicilan. Bahkan, sambung terdakwa, suaminya sampai sempat membawakan uang ke dalam lapas guna memenuhi kewajibannya sebagai kesepakatan dengan kelompok dan pihak pemerintah.

Kuasa hukum terdakwa, Agus Sujoko, didampingi Edy Hartaka dan Pande Made Sugriarta, Minggu (22/3) kemarin mengatakan, sisa "utang" Rp 40 jutaan karena terdakwa dibantu suami dan keluarganya terus membayar cicilan. Sisa itu dihitung dari cicilan yakni Rp 15,4 juta plus Rp 21 juta. "Jadi, Rp 76 juta dikurangi 36 juta, ya sisa sekitar Rp 40 juta," katanya.

Suciati sangat berharap majelis hakim dan jaksa yang bakal segera menuntut perkara ini bisa membebaskan dirinya dan kembali pada perjanjian untuk dibayar dengan cara mencicil. "Saya pingin cepat bekerja, berdagang jualan *canang* supaya bisa membayar cicilan ini. Semoga saya bisa dibebaskan. Anak-anak masih membutuhkan saya," katanya sambil menangis berurai air mata.

Dalam perkara ini, pemeriksaan saksi memang sudah selesai. Pekan ini, rencananya jaksa dari Kejari Denpasar akan membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi. Sementara dalam pemeriksaan sebelumnya, terdakwa mengakui telah menggunakan uang bantuan itu karena babinnya mati dan biaya operasional yang dikeluarkan banyak. Termasuk, dipakai membeli pakan dan membuat kandang.

Setelah ada pemeriksaan dari BPKP, ia sempat dipanggil dalam rapat yang digelar pihak desa dan Kecamatan Petang. Ada keputusan saat itu, bahwa terdakwa akan mencicil membayarnya. "Saya mengatakan siap bertanggung jawab dan akan mengganti semua uang bantuan tersebut dengan cara mencicil," jelasnya di persidangan. (asa)

Edisi	:	_____
Hal	:	_____



Jalan Rusak, Jembatan Nyaris Putus

Tabanan (Bali Post) -

Jalan menuju Banjar Tibu Dalem, Desa Pujungan, Pupuan kondisinya rusak parah. Tak hanya infrastruktur jalan, satu-satunya jembatan penghubung kondisinya sangat memprihatinkan. Berdasarkan pantauan di lapangan, jembatan sepanjang 10 meter dan lebar tiga meter tersebut berlubang, lapisan aspalnya mengelupas.

Masyarakat yang hendak melintas di jembatan tersebut terkadang was-was. Apalagi jembatan tersebut berada di atas jurang sedalam 10 meter.

Salah seorang warga Banjar Tibu Dalem, Wayan Purwa Astika mengatakan, karena khawatir mengangkut hasil pertanian melewati jembatan tersebut, sebagian besar petani mengeluarkan biaya tambahan untuk bisa membawa hasil pertaniannya. Mereka terpaksa menyewa tukang ojek dengan biaya Rp 50 ribu. "Petani kecil seperti

saya ini tidak sanggup menyewa truk maupun mobil bak terbuka, jadi kami kerap menyewa jasa tukang ojek," ujarnya.

Menurutnya tak hanya ongkos ojek yang tinggi, harga bahan bangunan yang dibeli oleh masyarakat Tibu Dalem juga dikenai ongkos kirim yang cukup mahal. "Jika bahan bangunan sekitar Rp 2 juta, ongkos kirim bisa sampai Rp 500 ribu," jelasnya.

Ia berharap pemerintah daerah bisa memberikan prioritas perbaikan di desanya. Menurutnya jembatan terse-

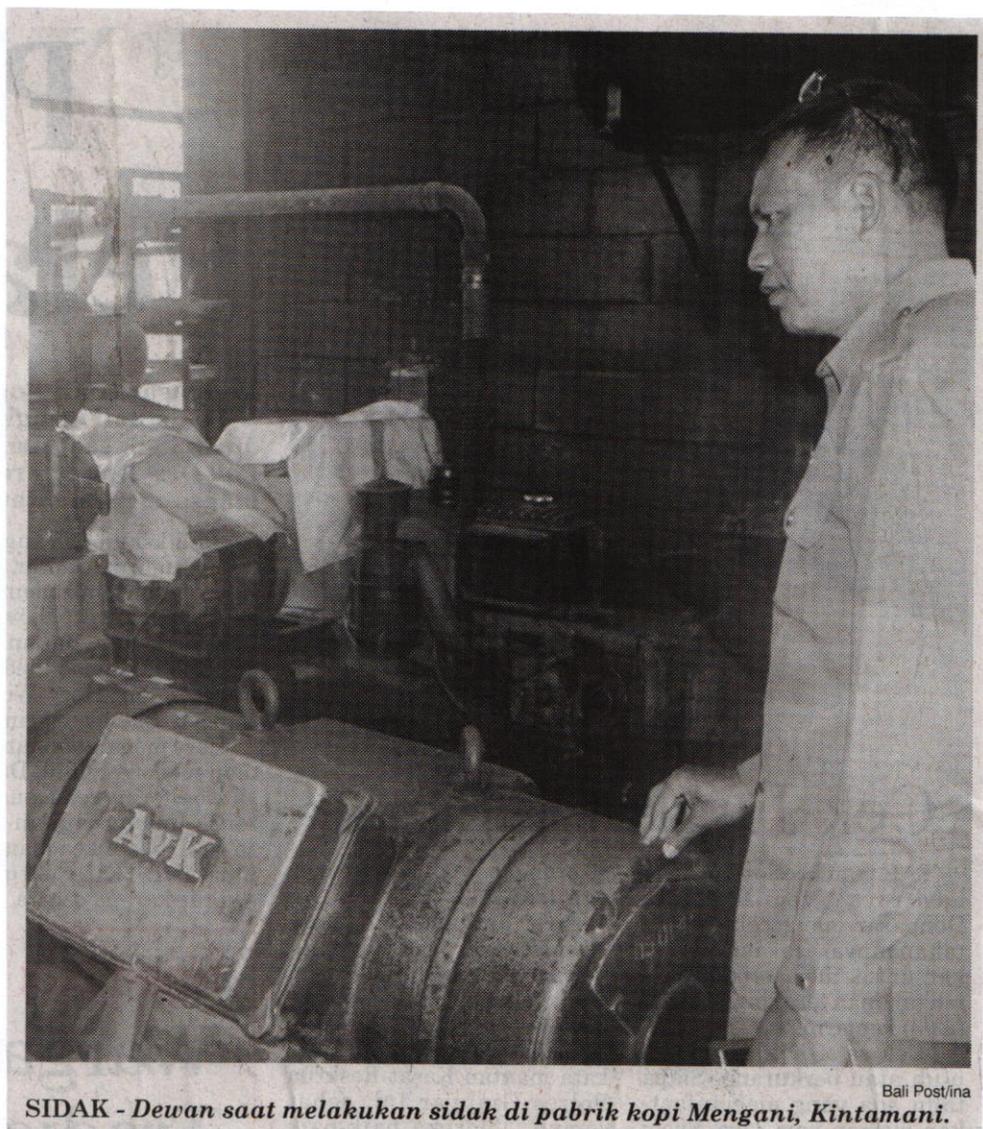
but sebenarnya sudah pernah diperbaiki Pemkab Tabanan tiga bulan lalu. Pengerjaannya dilakukan oleh masyarakat dengan sistem borongan, yakni mengganti besi batangan yang patah sekitar 1,5 meter dan memasang sejumlah kayu. Camat Pupuan Putu Arya Suta mengatakan untuk perbaikan jalan pihaknya telah memohon kepada Pemkab Tabanan lewat program partisipatif. Sedangkan untuk perbaikan jembatan, pihak Bina Marga PU Tabanan sudah turun ke lokasi mengecek tingkat kerusakan. (kmb28)

Edisi : Senin, 23 Maret 2015

Hal : 13



Kadis P3 Bantah Pabrik Kopi di Mengani Nganggur



SIDAK - Dewan saat melakukan sidak di pabrik kopi Mengani, Kintamani.

Bali Post/ina



Edisi : Senin, 23 Maret 2015

Hal : 10



Bangli (Bali Post) -

Hasil sidak dewan yang menyebutkan pabrik kopi di Desa Mengani, Kintamani nganggur, dibantah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan (P3) Bangli. Aset milik pemerintah tersebut hingga saat ini masih tetap beroperasi dan dikelola oleh pihak kedua yakni CV TAM (Tri Agung Mulya). "Sampai saat ini masih beroperasi. Masih dikelola CV TAM," kata Kepala Dinas P3 A.A. Samba saat dikonfirmasi, Minggu (22/3) kemarin.

Dia menjelaskan, kerja sama pemerintah dengan CV TAM hingga saat ini masih tetap berjalan. Hanya saja menggunakan kontrak lama. Itu dikarenakan saat masa kontrak CV TAM berakhir April 2014 lalu, tidak ada investor yang mengajukan penawaran ke Pemkab. Sehingga oleh Pemkab, CV TAM kembali diberikan izin mengelola pabrik kopi tersebut dengan nilai kontrak lama yakni Rp 115 juta per tahun hingga April 2015 mendatang. "Kalau itu dibiarkan nganggur kan rugi dia (CV TAM) bayar kontrak," ujarnya.

Mengingat masa kontrak dengan CV TAM akan berakhir bulan depan, Pemkab sejauh ini sudah membuka peluang kepada para investor lainnya yang berminat mengelola pabrik kopi di atas tanah seluas 3 hektar tersebut. Investor yang akan diberikan izin mengelola adalah yang berani mengontrak dengan nilai paling tinggi.

Samba mengakui sejauh ini sudah ada beberapa investor yang melakukan penjajakan, salah satunya yakni CV Air Mancur. Namun karena belakangan investor tersebut mundur, sesuai hasil rapat

Rabu lalu, tim memutuskan akan memberikan pengelolaan kembali kepada CV TAM. "Tapi kalau memang dewan ada membawa investor lain, kita masih akan tunggu itu," terangnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Komang Carles bersama Komisi II sempat melakukan sidak ke pabrik kopi di Mengani, Kintamani pada Kamis (19/3) lalu. Hasilnya, dewan menyebutkan bahwa keberadaan pabrik kopi milik Pemkab Bangli yang berlokasi di Desa Mengani, Kintamani nganggur sejak setahun terakhir. Pascamasa kontrak CV TAM (Tri Agung Mulya) berakhir April 2014 lalu, Pemkab tak melakukan upaya pemanfaatan terhadap aset itu.

Bahkan perpanjangan kontrak yang sempat disampaikan CV TAM pada Maret 2014 lalu hingga saat ini tak kunjung dirispons pemerintah. Menindaklanjuti persoalan tersebut, dewan berencana akan memanggil pihak eksekutif dalam hal ini Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan (P3). (kmb40)



Kualitas Layanan Belum Maksimal

PDAM Denpasar Akui Terkendala Sejumlah Persoalan

Denpasar (Bali Post) -

Layanan air bersih untuk masyarakat di Kota Denpasar belum maksimal. PDAM Denpasar masih menemui sejumlah kendala, baik menyangkut produksi, distribusi maupun dari sisi anggaran. Direktur Utama PDAM Denpasar Putu Gede Mahaputra mengungkapkan masih banyak persoalan yang harus dituntaskan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Dari sisi produksi, permasalahan ada yang saat ini di antaranya terbatasnya sumber air baku dan kapasitas produksi. Hal inilah yang menyebabkan debit air menjadi tidak maksimal dan berimbas pada kenyamanan pelanggan. Mahaputra mengakui jaringan perpipaan yang

ada sekarang tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Cakupan pelayanan cenderung mengalami penurunan.

Sampai saat ini, jam pelayanan rata-rata belum mampu 24 jam per hari. Tak hanya itu, masih banyak daerah yang

belum terlayani termasuk mengalami krisis layanan seperti di wilayah Denpasar Barat dan Denpasar Utara. "Sedangkan dari sisi keuangan, kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi dalam rangka mendukung penyerapan air dari IPA Petanu, terbatas," kata Mahaputra, belum lama ini.

Dari data bulan Februari 2015, total kapasitas produksi PDAM Denpasar mencapai 3.352.643 meter kubik atau 1.253,69 liter per detik. Sementara kebutuhan air sebanyak 1.652 liter per detik. Itu berarti, PDAM Denpasar masih kekurangan kapasitas produksi sebanyak 398,31 liter

per detik.

Meski diakui masih banyak kendala yang dihadapi, Mahaputra juga menyebut pihaknya tidak tinggal diam. Beberapa upaya telah dilakukan guna mengatasi berbagai persoalan tersebut.

Dari sisi produksi, pihaknya di antaranya melakukan optimalisasi kapasitas produksi IPA Ayung II, IPA Waribang dan sumur-sumur bor yang ada. Termasuk, melakukan pembelian air curah olahan IPA Tukad Petanu dari Sarbagitaku sebanyak 25-40 liter per detik pada titik interkoneksi pipa di simpang Tol Benoa. PDAM

Denpasar juga berupaya meningkatkan kualitas distribusi air. Misalnya dengan pemasangan pompa boster di Lembusura di atas reservoir, percepatan perbaikan kebocoran pipa melalui aplikasi sistem informasi pelayanan pelanggan, pengembangan jaringan distribusi primer dan sekunder Kota Denpasar serta melakukan pemeliharaan instalasi di sumber-sumber secara rutin. (kmb25)

Edisi : Senin, 23 Maret 2015

Hal : 2